

## **Pengaruh Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Nur Fadilah<sup>1\*</sup>, Samirah Dunakhir<sup>2</sup>, Hariany Idris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Makassar

\* E-mail Korespondensi: fadilahn2321@gmail.com

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 02-09-2025*

*Revision: 16-09-2025*

*Published: 19-09-2025*

---

**DOI Article:**

**10.24905/mlt.v6i2.231**

---

### **A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sabbang. Populasi terdiri atas aparat desa dan masyarakat terkait pengelolaan dana desa, dengan sampel 45 responden yang dikumpul dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 5 poin dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, Partisipasi, Transparansi

### **A B S T R A C T**

*This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, and participation on the performance of village financial management in Sabbang Sub-district. The population consisted of village officials and communities related to village fund management, with a sample of 45 respondents collected using purposive sampling technique. Data were collected through a 5-point Likert scale questionnaire and analyzed using descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression, and hypothesis testing. The results show that accountability, transparency, and participation have a positive and significant influence on village financial management performance.*

**Key word:** *Perfomance of Village Financial Management, Accountability, Transparency, Participation*

---

### **Acknowledgment**

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

## PENDAHULUAN

Pemerintah ditingkat desa merupakan tatanan terkecil dari sebuah negara. Baik buruknya pemerintah di tingkat pusat juga ditentukan mulai dari pemerintahan di tingkat desa. Sehingga, sekecil apapun pemerintah desa, tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik serta pemberdayaan terhadap masyarakat. Pemahaman tentang pemerintahan desa yang utuh menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Pokok pemerintahan desa terkait tiga hal utama, yaitu politik desa, kewenangan desa dan anggaran desa. Ketiga persoalan tersebut terbingkai dalam satu isu utama, yaitu isu otonomi desa (Sari, 2020).

Berdasarkan struktur kedaulatan negara ini, otonomi desa membutuhkan pengawasan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten/kota, terkait sumber dana desa dan pengelolaan dana desa. Penyusunan APBDesa menjadi bagian dari pelaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pelimpahan otonomi dalam pengelolaan keuangan desa, desa diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat (Salma, dkk., 2022)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola dana desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Tahir, dkk., 2019).

Pengelolaan keuangan yang baik pada pemerintah desa, dapat dicerminkan dengan praktik-praktik pengelolaan pemerintahan yang baik atau seringkali disebut dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut, terdapat tiga prinsip *good corporate governance* yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Soleh, dkk., 2017). Namun demikian, permasalahan utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah kurangnya pemahaman, kesadaran, dan kapasitas kalangan pelaku khususnya sumber daya manusia aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintah berupaya mewujudkan pemerintahan yang

bersih dan berwibawa, yang sering disebut sebagai *good corporate governance*. Upaya ini muncul sebagai respon terhadap besarnya pendapatan desa dari berbagai sumber, yang harus dikelola dengan benar dan transparan. Dengan demikian, aparatur desa sebagai pengelola dana desa diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai tata cara dan tata kelola keuangan (Budiati, dkk., 2019).

Kecamatan Sabbang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kecamatan Sabbang terdiri dari satu Kelurahan dan Sembilan Desa, yaitu Kelurahan Marobo, Desa Bakka, Buntu Terpedo, Malimbu, Pararra, Pengkendekan, Sabbang, Salama, Tandung, Tulak Tallu. Sumber pendapatan desa pada Kecamatan Sabbang diperoleh dari alokasi dana desa.

**Tabel 1 Anggaran Desa di Kecamatan Sabbang Tahun 2023-2024**

| NO | NAMA DESA     | TAHUN            |                  |
|----|---------------|------------------|------------------|
|    |               | 2024             | 2025             |
| 1. | Bakka         | Rp.879.339.000   | Rp.815.730.000   |
| 2. | Buntu Terpedo | Rp1.251.629.000  | Rp899.670.000    |
| 3. | Malimbu       | Rp.1.024.043.000 | Rp.1.017.255.000 |
| 4. | Pararra       | Rp.1.091.615.000 | Rp.850.730.000   |
| 5. | Pengkendekan  | Rp.1.118.887.000 | Rp.993.257.000   |
| 6. | Sabbang       | Rp.1.199.731.000 | Rp.1.122.312.000 |
| 7. | Salama        | Rp.734.164.000   | Rp.697.910.000   |
| 8. | Tandung       | Rp.892.417.000   | Rp.980.186.000   |
| 9. | Tulak Tallu   | Rp.1.013.584.000 | Rp.938.586.000   |

Sumber: WwW.DJPK.Kemenkeu.Co.Id

Berdasarkan Tabel 1, data alokasi anggaran Desa dari tahun 2024 ke 2025 menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran pada hampir seluruh desa, berbeda dengan desa Tandung yang justru mengalami peningkatan sebesar Rp87.769.000. Sedangkan delapan desa lainnya mengalami penurunan alokasi dengan persentase yang bervariasi, mulai dari penurunan yang relatif kecil seperti desa Malimbu sebesar Rp.6.788.000 hingga yang paling signifikan seperti desa Buntu Terpedo yang turun sebesar Rp.351.959.000. Perbedaan besaran alokasi ini erat kaitannya dengan kinerja pengelolaan keuangan desa pada periode sebelumnya. Desa-desa yang menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang kurang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, dapat mengalami penurunan alokasi dana. Sebaliknya, peningkatan alokasi seperti yang terjadi di desa Tandung dapat mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan akuntabel. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting yang

menentukan besaran alokasi anggaran desa pada periode selanjutnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada sampel aparat desa dan masyarakat desa di Kecamatan Sabbang. Populasi penelitian ini aparat desa dan masyarakat desa di kecamatan Sabbang yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 45 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji instrumen terdiri dari uji validitas yang menunjukkan valid atau tidak setiap butir pernyataan dalam instrumen dapat dilakukan dengan mengkorelasi antara skor butir dengan skala skor total (Sugiyono, 2017). Uji reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Dunakhir, 2019). Selain itu analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai data yang digunakan

## HASIL

### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 2 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

| Descriptive Statistics            |           |         |         |       |                |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|-------|----------------|
|                                   | N         | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| Akuntabilitas                     | 45        | 17      | 25      | 20.49 | 2.063          |
| Transparansi                      | 45        | 9       | 15      | 12.22 | 1.444          |
| Partisipasi                       | 45        | 9       | 15      | 12.00 | 1.398          |
| Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa | 45        | 18      | 25      | 21.31 | 2.294          |
| <b>Valid N (listwise)</b>         | <b>45</b> |         |         |       |                |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) terdiri dari lima indikator, data yang dihasilkan adalah 17 untuk jumlah terendah yang diperoleh dari 45 responden, 25 untuk jumlah data tertinggi, dengan rata-rata (*mean*) total jawaban 20,49 dan standar deviasi sebesar 2,063. Variabel Transparansi ( $X_2$ ) terdiri dari tiga

indikator, data yang dihasilkan adalah 9 untuk jumlah terendah yang diperoleh dari 45 responden, 15 untuk jumlah data tertinggi, dengan rata-rata (*mean*) total jawaban 12,22 dan standar deviasi sebesar 1,444. Variabel Partisipasi ( $X_3$ ) terdiri dari 3 indikator, data yang dihasilkan adalah 9 untuk jumlah terendah yang diperoleh dari 45 responden, 15 untuk jumlah data tertinggi, dengan rata-rata (*mean*) total jawaban 12,00 dan standar deviasi sebesar 1,398. Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y), yang terdiri dari tiga indikator dengan jumlah lima pernyataan, data yang dihasilkan adalah 18 untuk jumlah terendah yang diperoleh dari 45 responden, 25 untuk jumlah data tertinggi, dengan rata-rata (*mean*) total jawaban 21,31 dan standar deviasi sebesar 2,294. Karena seluruh variabel penelitian memiliki nilai standar deviasi kecil dari rata-rata (*mean*) maka data pada variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kinerja pengelolaan keuangan desa memiliki sebaran yang tidak begitu besar sehingga pola data lebih stabil dan representatif untuk dilakukan analisis selanjutnya.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas**

| Variabel                              | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| Akuntabilitas ( $X_1$ )               | 0.835            | Reliabel   |
| Transparansi ( $X_2$ )                | 0.731            | Reliabel   |
| Partisipasi ( $X_3$ )                 | 0.788            | Reliabel   |
| Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Y) | 0.906            | Reliabel   |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, diperoleh hasil bahwa semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data telah reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* semua instrumen berada di atas nilai 0,70.

### Analisis Regresi Linear Berganda

**Tabel 4 Hasil Regresi Linear Berganda**

| Model      | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       |      |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |      |
|            | B                           | Std. Error | Beta                      | t     | Sig. |
| (Constant) | 1.135                       | 2.133      |                           | .532  | .598 |
| 1 X1       | .354                        | .135       | .318                      | 2.626 | .012 |
| X2         | .610                        | .217       | .384                      | 2.805 | .008 |
| X3         | .457                        | .174       | .278                      | 2.622 | .012 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 3 hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa model Persamaan analisis regresi linear berganda berdasarkan tabel 3 adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.135 + 0.354X_1 + 0.610X_2 + 0.457X_3$$

Berdasarkan model persamaan yang diperoleh nilai konstanta sebesar 1.135 bertanda positif mengindikasikan bahwa variabel independen yang terdiri dari akuntabilitas ( $X_1$ ), transparansi ( $X_2$ ), dan partisipasi ( $X_3$ ) bersifat konstan maka variabel kinerja pengelolaan keuangan desa menunjukkan nilai 1.135 bertanda positif. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 0,354 menunjukkan nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan akuntabilitas maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) sebesar 0,354 dengan asumsi variabel ( $X_2$ ) dan ( $X_3$ ) adalah konstan. Nilai koefisien regresi variabel transparansi ( $X_2$ ) sebesar 0,610 menunjukkan nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan transparansi maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) sebesar 0,610 dengan asumsi variabel ( $X_1$ ) dan ( $X_3$ ) adalah konstan. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi ( $X_3$ ) sebesar 0,457 menunjukkan nilai positif. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan partisipasi maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) sebesar 0,457 dengan asumsi variabel ( $X_1$ ) dan ( $X_2$ ) adalah konstan.

### Uji t

**Tabel 5 Hasil Uji t**

| Model      | Unstandardized Coefficients |            | Coefficients <sup>a</sup><br>Standardized Coefficients |  | t     | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|--|--|-------|------|
|            | B                           | Std. Error | Beta   |  |       |      |
| (Constant) | 1.135                       | 2.133      |  |  | .532  | .598 |
| 1 $X_1$    | .354                        | .135       | .318   |  | 2.626 | .012 |
| $X_2$      | .610                        | .217       | .384   |  | 2.805 | .008 |
| $X_3$      | .457                        | .174       | .278   |  | 2.622 | .012 |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4 menunjukkan hasil uji t pengaruh akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ), menunjukkan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_1$  diterima. Artinya akuntabilitas ( $X_1$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ). Hasil uji t pengaruh transparansi ( $X_2$ ) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ), menunjukkan nilai signifikansi 0,008 yang lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_2$  diterima. Artinya transparansi ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ). Hasil uji t pengaruh partisipasi

(X<sub>3</sub>) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y), menunjukkan nilai signifikansi 0,012 yang lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha = 0,05$ ), maka  $H_3$  diterima. Artinya partisipasi (X<sub>3</sub>) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

## Uji F

**Tabel 6 Hasil Uji F**

| ANOVA <sup>a</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 164.187        | 3  | 54.729      | 33.264 | .000 <sup>b</sup> |
|                    | Residual   | 67.457         | 41 | 1.654       |        |                   |
|                    | Total      | 231.644        | 44 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2025

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai sig.  $0,000 < 0,05$  maka  $H_4$  diterima. Artinya, akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>), dan partisipasi (X<sub>3</sub>) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y).

## Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi**

| Model Summary |                   |          |                   |                            |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model         | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1             | .842 <sup>a</sup> | .709     | .687              | 1.283                      |

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Hasil Olah Data SPSS,2025

Berdasarkan tabel 7, nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R Square* yaitu sebesar 0,709. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu akuntabilitas (X<sub>1</sub>), transparansi (X<sub>2</sub>), dan partisipasi (X<sub>3</sub>) menjelaskan variabel dependen yaitu kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 70,9%. Sisanya, yaitu 29,1% dipengaruhi oleh faktor di luar variabel penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa

Hasil uji parsial akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa menunjukan nilai Sig untuk pengaruh variabel Akuntabilitas (X<sub>1</sub>) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) adalah sebesar  $0,012 < 0,05$ . Hal ini berarti akuntabilitas (X<sub>1</sub>) berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y). Sehingga (H<sub>1</sub>) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial, berhasil didukung oleh data dengan kata lain hipotesis (H<sub>1</sub>) diterima. Penelitian ini mendukung teori *stakeholder* yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama, serta memperkuat literatur akuntabilitas publik bahwa akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang efektif. Hal ini juga sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai prinsip pertanggungjawaban publik, di mana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa perlu meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban publik melalui penyajian laporan keuangan yang transparan, tertib administrasi, dan mudah diakses.

### **Pengaruh Transparansi secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa**

Hasil uji parsial transparansi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa menunjukkan nilai Sig untuk pengaruh variabel transparansi (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y) adalah sebesar  $0,008 < 0,05$ . Hal ini berarti transparansi (X<sub>2</sub>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa (Y). Sehingga (H<sub>2</sub>) yang menyebutkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial, berhasil didukung oleh data dengan kata lain hipotesis (H<sub>2</sub>) diterima. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana pemerintah desa dituntut transparan atau terbuka kepada masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan desa yang ada di desa seperti apa, yang di mulai dari perencanaan hingga realisasi APBD. Penelitian ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* yang menekankan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Dengan adanya transparansi, masyarakat memperoleh informasi lengkap mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa perlu menyediakan akses informasi yang mudah melalui papan pengumuman, website, atau forum musyawarah agar masyarakat memahami proses pengelolaan keuangan desa.

### **Pengaruh Partisipasi secara parsial terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa**

Hasil uji parsial partisipasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa menunjukkan nilai Sig untuk pengaruh variabel partisipasi ( $X_3$ ) terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,012 < 0,05$ . Hal ini berarti partisipasi ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa ( $Y$ ). Sehingga ( $H_3$ ) yang menyebutkan bahwa partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa secara parsial, berhasil didukung oleh data dengan kata lain hipotesis ( $H_3$ ) diterima. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dimana partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama memiliki hak dan peran penting dalam memengaruhi kebijakan publik serta mengawasi penggunaan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, memperkuat legitimasi pemerintah desa dan menegaskan bahwa partisipasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pemerintah desa perlu membuka ruang musyawarah, memberikan akses informasi yang jelas, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan maupun pengawasan keuangan desa.

### **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi secara Simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa sehingga hipotesis ( $H_4$ ) dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. uji F sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ), akuntabilitas memiliki kontribusi sebesar 51,3% terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, transparansi berkontribusi sebesar 61% dan partisipasi berkontribusi sebesar 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh paling besar dibandingkan dua variabel lainnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan bagian penting dari *good corporate governance* serta bukti bahwa keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme

pertanggungjawaban publik, memperluas akses informasi keuangan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara aktif guna membangun kepercayaan dan legitimasi publik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kantor pemerintah desa di Kecamatan Sabbang, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kantor pemerintah desa di Kecamatan Sabbang, Partisipasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa pada Kantor pemerintah desa di Kecamatan Sabbang, serta Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa pada Kantor pemerintah desa di Kecamatan Sabbang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiati, Y., Sugiyanto, E. K., & Niati A. (2019). Pengaruh Gcg Terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa Dengan Moderasi Sistem Pengendalian Internal. *EKUITAS Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(4), 978–979.
- Dunakhir, S. (2019). Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan. *Prosding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 1–4.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Salma, M., Diana, N., & Hariri. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik). *E-Jra*, 11(9).
- Sari, B. R. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2), 488–507. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss2.art15>
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa terhadap Dana Desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *Ekombis Review*, 31(7), 114–125.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, M., Anwar, A., & Dunakhir, S. (2019). Analisis pengelolaan keuangan Dana Dsa di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono. *Ekonomi*, 1–16.